

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu menarik atensi penuh dari pemerintah terkhususnya dalam bidang pembangunan. Sektor pertanian diharapkan mampu berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi alam yang melimpah di Indonesia merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan di bidang pertanian (Ashari & Hariani, 2018). Pembangunan pertanian ini merupakan salah satu prioritas utama yang perlu disertakan dalam kegiatan pertanian. Karena dengan adanya pembangunan pertanian, nantinya diharapkan mampu berperan serta dalam peningkatan produktivitas di sektor pertanian (Etuk & Ayuk, 2021). Pembangunan pertanian nantinya akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan potensi perekonomian pertanian. Latar belakang pengetahuan, akses teknologi, dan alokasi input serta output yang tepat merupakan salah satu faktor pendukung yang diperlukan dalam pembangunan pertanian (Djokoto et al., 2022).

Pertanian sendiri sangat bergantung pada ketersediaan input pertanian, seperti benih, pupuk, dan pestisida. Salah satu input pertanian yang sangat esensial adalah pupuk, karena pupuk merupakan salah satu input yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk yang maksimal akan menghasilkan output pertanian yang maksimal juga (Fahmi & Maria, 2020). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai penyediaan pupuk bersubsidi bagi para petani. Pupuk bersubsidi tersebut meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK, dan pupuk Organik. Kebijakan pupuk bersubsidi ini telah diterapkan melalui skema Harga

Eceran Tertinggi (HET) (Warr & Yusuf, 2014). Namun kenyataannya dalam pelaksanaan pendistribusian pupuk masih banyak terdapat permasalahan terkait pengawasan, pengadaan serta penyaluran pupuk bersubsidi (Biroinfrasda, 2019).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah guna menangani masalah terkait pupuk bersubsidi ini adalah dengan melalui program kartu tani. Kartu tani merupakan kartu debit BRI *co-branding* yang digunakan dalam pembacaan alokasi pupuk bersubsidi pada petani sesuai dengan luas lahan yang dimiliki. Kartu tani ini berlaku bagi petani yang memiliki luas lahan maksimal 2 hektar. Selain itu kartu tani juga berguna untuk transaksi pembayaran pupuk bersubsidi yang nantinya akan diproses melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang nantinya akan ditempatkan di setiap pengecer resmi pupuk bersubsidi. Kartu tani juga dapat digunakan untuk melakukan semua transaksi perbankan pada umumnya. Pengguna kartu tani nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI). Sistem tersebut nantinya berisikan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang isinya terdiri dari nama petani, jenis tanaman, luas lahan, dan alokasi pupuk yang dibutuhkan petani (Biroinfrasda, 2019).

Dalam pelaksanaannya kartu tani menerapkan prinsip 6T yaitu tepat jenis, tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat waktu. Kartu tani tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendistribusikan pupuk tetapi dapat digunakan sebagai pembantu alokasi bantuan sarana produksi padi (Saprodi) dan sarana produksi pertanian (Saprotan) supaya sesuai dengan sasaran kepada petani yang masuk dalam kategori miskin. Oleh sebab itu dengan adanya kartu tani, petani dapat memperoleh pupuk yang sesuai dengan haknya, selain itu kartu tani juga

berguna untuk membantu dalam mengembangkan sektor pertanian, serta dapat memberikan kesejahteraan kepada petani (Biroinfrasda, 2019).

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang telah menerapkan program kartu tani. Pada tahun 2017 pemerintah Purworejo telah mendistribusikan kartu tani sebanyak 32.507 buah kartu, dari total peserta penerima kartu tani yaitu sebanyak 81.576 petani (Aditya, 2017). Salah satu kecamatan di Kabupaten Purworejo yang telah menerapkan program kartu tani yaitu Kecamatan Pituruh. Sebanyak 6.381 petani di Kecamatan Pituruh telah menerima kartu tani dari jumlah total keseluruhan penerima kartu tani yaitu sebanyak 8.136 petani (BPP Pituruh, 2020). Desa Girigondo merupakan salah satu desa di Kecamatan Pituruh yang memiliki jumlah populasi pemilik kartu tani terbanyak. Menurut data dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pituruh (2020) terdapat 335 petani yang sudah memiliki kartu tani.

Tabel 1. Data Pemilik Kartu Tani di Desa Girigondo

No.	Kelompok Tani	Pemilik Kartu Tani
1	Tani Jaya	36
2	Sri Dadi	104
3	Tani Muda II	81
4	Wahyu Minulyo	45
5	Tani Muda	69
Jumlah		335

Sumber: BPP Kecamatan Pituruh, 2020

Berdasarkan kondisi di lapangan keberadaan program kartu tani ini smasih belum berjalan secara optimal. Pada kenyataannya dari total petani yang sudah memiliki kartu tani, masih terdapat petani yang memiliki minat yang rendah terhadap penggunaan kartu tani sebagai alat pembelian pupuk bersubsidi. Munculnya inovasi di berbagai bidang pertanian tentunya akan mempengaruhi kecenderungan atau sikap petani, baik itu sikap menerima maupun menolak

keberadaan inovasi tersebut. Kecenderungan petani dalam menerima maupun menolak keberadaan program kartu tani tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap petani terhadap program kartu tani. Keterlibatan sikap petani terhadap program kartu tani akan ditandai dengan keberhasilan program tersebut secara berkelanjutan. Oleh sebab itu perlu diteliti bagaimana sikap petani di Desa Girigondo terhadap program kartu tani. Selain itu perlu diketahui juga mengenai faktor-faktor pembentuk sikap apa saja yang berhubungan dengan sikap petani terhadap program kartu tani.

B. Tujuan

1. Mengetahui sikap petani terhadap program kartu tani di Desa Girigondo.
2. Mengetahui hubungan faktor-faktor yang membentuk sikap dengan sikap petani terhadap program kartu tani di Desa Girigondo.

C. Kegunaan

1. Bagi peneliti dan akademis, penelitian dapat dijadikan sumber wawasan dan pengetahuan mengenai kartu tani.
2. Bagi petani, penelitian dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan mengenai program kartu tani.
3. Bagi pemerintah, penelitian dapat dijadikan pertimbangan dan pengembangan program kartu tani kedepannya.
4. Bagi masyarakat umum, penelitian dapat dijadikan informasi tambahan perihal program kartu tani.